

## **ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KEMAMPUAN FISKAL PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

Aulia Azimi<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

---

### **ABSTRACT**

The method used in this research is comparative method using quantitative. The data source used is secondary data. The results shows that the comparison between efficiency and effectivity from district / city in West Borneo Province in 2006 – 2010 has declining trend and interrelated. While local fiscal capability which is measured from government finance performance shows that its dependence is still high enough because the contribution of fund balance is still above 50%.

Base on the estimation result which is regressed by using EGLS method, it is obtained the result shows that two variables from local finance performance are not significant which are PAD effectivity ratio (REPAD) and local finance dependency ratio (RKetKD), where the estimation result also shows the existence of negative relation but significant to degree of decentralization ratio (RDD). The financial performance of local government still shows dependence on the central government, therefore it must be learn to be independent.

---

### **ARTICLE INFO**

Article History:

Received September 8<sup>th</sup> 2020

Received in revised from September 12<sup>th</sup> 2020

Accepted September 2020

Keywords:  
efficiency,  
effectivity, fiscal  
capability,  
government  
expenditure, and  
economic growth

---

\* Corresponding Author; E-mail address: auliaazimi.iain@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, memuat tentang pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan cara menggali potensi yang ada dan meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah yang berkarakteristik *good governance*.

Pelimpahan wewenang tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 memberikan gambaran adanya hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dan masih adanya kontrol dari Pusat dalam bentuk dana perimbangan atau dikenal istilah “*money follow function*” artinya “dengan kewenangan, uang akan dicari” bukan sebaliknya (Syaukani dkk, 2007: 203). Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (Alisman, 2014: 49). Maksud dari pernyataan tersebut adalah dengan kewenangan yang ada pemerintah daerah akan dapat menggali potensi daerahnya untuk membiayai pembangunan pemerintahan menuju pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan pembangunan akan dapat dilakukan jika Pemerintah Daerah bijaksana dalam mengelola keuangan daerahnya agar tercipta peningkatan kemampuan keuangan daerah. Maka dari itu, menurut Khusaini, 2006 dalam Ladjin (2008: 16) bahwa: otonomi daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kab./Kota Propinsi Kalimantan

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%) (harga konstan 2000)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Kab.Sambas	3,95	5,38	5,51	5,43	5,88
Kab.Bengkayang	6,29	6,12	5,57	4,50	4,63
Kab.Landak	4,78	5,13	4,29	4,67	5,01
Kab.Pontianak	4,31	5,15	5,90	1,32	2,10
Kab.Sanggau	8,23	5,48	3,49	4,95	4,15
Kab.Ketapang	13,82	10,33	7,14	-1,22	7,51
Kab.Sintang	5,02	5,16	4,70	5,38	5,21
Kab.Kapuas Hulu	4,07	3,42	3,55	3,70	4,44
Kab.Sekadau	6,20	7,63	5,76	5,35	5,54
Kab.Melawi	4,67	5,44	5,11	4,22	5,26
Kab. Kayong Utara	-	3,72	5,84	2,78	5,92
Kab. Kubu Raya	-	-	5,02	5,87	6,23
Kota Pontianak	4,96	5,45	5,34	5,35	5,39
Kota Singkawang	6,34	4,72	4,90	4,88	5,54

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan cenderung menurun menunjukkan prestasi dalam mengendalikan maupun membangun perekonomiannya masih kurang produktif, maka Pemerintah Daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat harus dapat mengelola keuangan daerahnya dengan menerapkan prinsip *value for money* atau 3E agar dana transfer dari pusat dapat membantu dalam membiayai kebutuhan fiskalnya dan mendorong pembangunan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan itu perlu suntikan dana pada APBD dari pemerintah pusat yang berupa dana desentralisasi.

Mardiasmo (2000) dalam Alisman (2014: 50) mengkaji bahwa dengan adanya dana desentralisasi akan berimplikasi pada APBD yaitu pos penerimaan dengan konsekuensi menggelembungnya jumlah penerimaan daerah, perubahan jumlah penerimaan tersebut harus diikuti dengan pengeluaran keuangan daerah yang efisien dan efektif dan disertai dengan peningkatan sumber daya manusia, persoalan otonomi daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah tetapi lebih berfokus pada pemberian wewenang pemerintah daerah untuk menentukan dan mengatur penggunaan dana-dana perimbangan tersebut.

Tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat tercermin dari tingginya kontribusi Dana Perimbangan (DP) yang lebih dari 50% jika dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Hal ini menunjukkan bahwa PAD masih belum memiliki peran yang dominan dalam membiayai pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	2006		2007		2008		2009		2010	
	PAD (%)	DP (%)								
Kab.Sambas	3,13	95,41	3,35	89,40	3,99	92,41	3,78	84,32	3,63	78,38
Kab.Bengkayang	0,79	96,86	3,32	87,89	4,31	85,90	3,74	89,59	3,74	89,59
Kab.Landak	3,50	93,62	3,32	89,34	1,72	91,80	2,61	84,95	2,70	78,15
Kab.Pontianak	3,68	95,03	2,96	91,38	2,90	91,91	6,10	72,76	3,18	77,87
Kab.Sanggau	3,23	95,10	3,07	91,17	4,00	90,63	4,09	89,71	3,18	86,46
Kab.Ketapang	2,60	96,09	2,76	94,28	3,00	94,53	3,81	91,38	3,78	90,35
Kab.Sintang	4,03	93,98	3,28	94,32	4,04	91,06	4,45	89,25	4,18	83,45
Kab.Kapuas Hulu	1,76	96,52	5,24	92,06	2,29	95,22	2,65	92,34	2,65	85,72
Kab.Sekadau	1,20	95,85	1,69	93,71	2,25	94,12	3,22	90,20	2,76	76,88
Kab.Melawi	1,82	97,92	1,69	95,17	3,12	85,98	2,29	86,83	3,36	86,33
Kab.Kayong Utara	-	-	-	-	0,79	84,29	1,71	87,78	1,75	81,23
Kab.Kubu Raya	-	-	-	-	1,06	0	2,18	89,36	2,26	82,82
Kota Pontianak	10,22	89,34	10,40	81,41	10,37	79,23	9,83	74,55	11,41	65,19
Kota Singkawang	5,59	93,47	5,50	90,31	5,34	87,71	5,54	82,94	3,63	78,38
Rata-rata	3,46	94,93	3,88	90,87	3,51	83,20	4,00	86,14	3,73	81,49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Propinsi Kalimantan Barat yang diolah.

Tabel 2 menunjukkan kondisi kebijakan desentralisasi fiskal Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat masih belum mampu mengoptimalkan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari PAD. Untuk itu perlunya pengukuran kinerja pemerintah daerah yang diukur dari APBD yang diperkuat oleh banyaknya defisit anggaran yang terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3. Surplus (Defisit) Belanja dan Pendapatan Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	Surplus/Defisit (Rp M)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Kab.Sambas	31,50	(271,43)	(42,41)	(0,65)	(9,96)
Kab.Bengkayang	(23,87)	63,63	2,35	(51,01)	(51,01)
Kab.Landak	21,87	10,37	(19,48)	(57,86)	(30,74)
Kab.Pontianak	23,24	34,78	(51,51)	(14,61)	24,31
Kab.Sanggau	25,65	(154,94)	2,33	2,70	(3,68)
Kab.Ketapang	86,18	79,47	(63,05)	(39,10)	(4,26)
Kab.Sintang	75,22	14,12	(1,17)	5,03	18,95
Kab.Kapuas Hulu	(24,58)	53,23	(8,09)	15,41	24,23
Kab.Sekadau	32,71	18,18	(20,12)	(36,08)	(4,51)
Kab.Melawi	2,18	(5,65)	10,41	6,92	2,49
Kab.Kayong Utara	-	-	23,22	24,85	(18,49)
Kab.Kubu Raya	-	-	6,41	32,98	(3,93)
Kota Pontianak	227,57	19,25	171,83	11,32	12,83
Kota Singkawang	0,86	2,42	7,92	(41,83)	(43,41)

Sumber : Badan Pengelola Aset Kekayaan Daerah (BPKAD) Kal-Bar (data diolah)

Terjadinya defisit anggaran pada tabel 3 menunjukkan lemahnya perencanaan pengeluaran yang pada akhirnya menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah. Jika terus berada dalam kondisi tersebut, peranan Pemerintah Daerah akan menjadi lemah baik sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan *entrepreneur* dalam proses pembangunan daerah (Halim, 2007: 23).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas Pemerintah Daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat perlu memonitor APBD yang merupakan implikasi nyata dari otonomi daerah yang memiliki kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dengan tetap menerapkan prinsip *value for money* atau prinsip 3E (Ekonomis, efisien, dan Efektif) sehingga diketahui perbandingan efisiensi dan efektivitas keuangan daerah tersebut, perbandingan kemampuan fiskal daerah yang diukur dari kinerja keuangan daerah, pengaruh pengeluaran pemerintah dan kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat di era otonomi daerah.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan jenis data yaitu data panel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* mengolah data menggunakan *Microsoft Excel* dan *E-Views*. Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan analisis data menggunakan *value for money* dan regresi untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**PEMBAHASAN***a. Analisis Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010**1) Tingkat Ekonomis Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat*

Tabel 4. menunjukkan bahwa tingkat ekonomis keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat sebagian besar masuk kategori ekonomis (nilai yang kurang dari 100%) artinya ada kehematan atau efisiensi belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah. Tetapi ada satu Kabupaten/Kota yang masuk kategori tidak ekonomis (nilai lebih dari 100%) yaitu Kab. Sanggau.

Tabel 4. Tingkat Ekonomis Keuangan Daerah Kab/Kota Propinsi Kalbar 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	89,60	91,82	96,89	96,05	96,67	94,22
Kab.Bengkayang	162,03	70,80	73,88	83,74	83,74	93,27
Kab.Landak	89,57	97,57	95,31	99,73	96,90	95,86
Kab.Pontianak	97,13	91,16	91,37	94,62	90,68	91,85
Kab.Sanggau	110,92	165,52	91,21	93,92	92,37	107,03
Kab.Ketapang	86,37	83,79	90,30	95,09	94,60	90,09
Kab.Sintang	85,57	91,35	91,41	91,15	90,88	90,38
Kab.Kapuas Hulu	104,94	89,76	94,59	92,71	94,45	93,33
Kab.Sekadau	88,52	86,55	92,12	93,61	91,35	90,56
Kab.Melawi	93,36	95,89	92,68	92,32	93,57	93,55
Kab.Kayong Utara	-	-	84,44	88,98	87,80	86,95
Kab.Kubu Raya	-	-	95,38	92,12	90,40	92,63
Kota Pontianak	91,77	91,32	73,88	91,34	91,01	88,21
Kota Singkawang	144,01	91,13	89,35	93,02	102,25	92,26

Sumber: Hasil olah data peneliti tahun 2010

Keekonomisan suatu daerah bisa terjadi dalam dua kondisi yaitu penghematan anggaran dalam menjalankan pemerintahannya dan penghematan belanja yang dilakukan karena belanja belum sepenuhnya selesai tetapi sudah harus melakukan tutup buku atau anggaran dikarenakan ada kegiatan yang belum selesai pada waktunya sehingga dana riil lebih kecil dibandingkan dana yang dianggarkan atau untuk melakukan penghematan anggaran, belanja yang dilakukan tidak memenuhi standar. Akibatnya terdapat proyek-proyek yang seharusnya selesai tepat waktu tetapi jauh dari harapan, seperti proyek gagal sebelum operasi.

*2) Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat*

Tabel 5. menunjukkan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat sebagian besar masuk kategori efisien (nilai kurang dari 100%) artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal dengan tingkat output tertentu tetapi terdapat tiga kabupaten dan satu kota yang masuk kategori tidak efisien (nilai lebih dari 100%).

Tabel 5. Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	93,08	95,86	107,34	100,10	101,38	99,55
Kab.Bengkayang	108,44	83,16	99,48	112,47	112,47	103,20
Kab.Landak	94,13	97,69	104,10	111,41	105,40	102,55
Kab.Pontianak	95,73	94,54	107,36	104,15	94,92	99,34
Kab.Sanggau	94,36	129,01	99,61	99,57	100,57	104,62
Kab.Ketapang	86,57	89,79	108,59	104,94	102,74	98,53
Kab.Sintang	86,16	97,71	100,17	99,23	97,38	96,13
Kab.Kapuas Hulu	94,06	90,99	101,22	97,75	96,88	96,18
Kab.Sekadau	87,55	93,97	105,92	110,19	101,04	99,73
Kab.Melawi	99,27	101,64	97,53	98,34	99,40	99,24
Kab.Kayong Utara	-	-	84,54	92,24	105,43	94,07
Kab.Kubu Raya	-	-	80,65	93,03	100,65	91,44
Kota Pontianak	52,60	96,54	72,22	98,31	98,32	83,60
Kota Singkawang	93,48	99,26	97,86	110,15	102,13	100,58

Sumber: Hasil olah data peneliti tahun 2010

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki surplus anggaran telah efisien dalam mengelola anggarannya tetapi bisa berada dalam dua kondisi yaitu kondisi yang benar-benar mampu memanfaatkan sumber daya yang ada atau berada pada kondisi yang disebutkan di atas yaitu adanya program yang belum terlaksana sepenuhnya.

### 3) *Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010*

Tabel 6. menunjukkan bahwa sebagian besar kab/kota di Propinsi Kalimantan Barat masuk kategori efektif (nilai lebih dari 100%) dan tiga kabupaten dan satu kota masuk kategori tidak efektif (nilai kurang dari 100%).

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Keuangan Kab/Kota Propinsi Kal-Bar 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	101,48	105,79	99,47	101,75	100,54	101,81
Kab.Bengkayang	152,19	103,98	99,87	103,58	103,58	112,64
Kab.Landak	103,17	107,06	99,50	98,48	99,09	101,46
Kab.Pontianak	97,00	102,48	94,83	100,89	98,07	98,65
Kab.Sanggau	100,24	99,95	99,09	101,99	99,26	100,10
Kab.Ketapang	104,34	107,63	104,53	104,23	99,99	104,14
Kab.Sintang	102,02	105,29	102,25	103,92	105,18	103,73
Kab.Kapuas Hulu	103,93	105,44	104,77	104,22	104,43	104,56
Kab.Sekadau	103,54	103,48	100,62	99,31	95,86	100,56
Kab.Melawi	95,92	94,15	96,49	97,71	97,78	96,41
Kab.Kayong Utara	-	-	99,82	102,33	93,36	98,50
Kab.Kubu Raya	-	-	118,27	100,36	95,39	104,67
Kota Pontianak	95,01	96,40	97,01	95,57	95,53	95,90

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kota Singkawang	102,08	103,03	100,07	98,95	98,93	100,61

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Diketahui bahwa efektivitas keuangan daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 – 2010 berkisar dari 100,07% – 118,27%. Terdapat Kabupaten/Kota yang tidak efektif selama lima tahun dari tahun 2006 – 2010 tetapi memiliki tingkat efisiensi yang baik yaitu Kabupaten Melawi dan Kota Pontianak.

Berdasarkan fenomena di atas, tidaklah mudah memadukan antara tingkat efisiensi dengan efektivitas, sebab terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki efisiensi yang baik berbanding terbalik dengan tingkat efektivitasnya. Namun jika kita perhatikan Tabel 5 dan Tabel 6 terdapat kecenderungan menurunnya tingkat efisiensi dan efektivitas dari tahun 2006 – 2010.

Berdasarkan hasil estimasi dan pemaparan di atas dapat ditelaah bahwa jika program dilakukan dengan efisien dan efektif dapat dikatakan program tersebut masuk kategori *cost-effectivnes*. Artinya dengan dana yang ada Pemerintah Daerah mampu mengelola sumber daya atau menggali potensi daerahnya secara riil yang terlihat dari keberhasilan program yang dijalankan dalam melayani publik dengan tujuan memberikan *outcome* atau dampak yang baik bagi masyarakat sehingga dapat lebih memicu partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi ke arah peningkatan pendapatan perkapita.

b. *Analisis Perbandingan Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat*

1) *Rasio Efektivitas PAD*

Tabel 7. menunjukkan terdapat tujuh kabupaten yang masuk kategori (Sularso dan Restianto, 2011: 112) sangat efektif (nilai lebih dari 100%), dua kabupaten dan kota Singkawang masuk kategori efektif (90-100%), kota Pontianak masuk kategori cukup efektif (80-90%) dan tiga kabupaten masuk kategori kurang efektif (70-80%).

Tabel 7. Rasio Efektivitas PAD Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	102,03	101,88	101,01	100,17	91,33	99,28
Kab.Bengkayang	106,60	147,63	176,95	145,41	123,80	140,08
Kab.Landak	488,25	282,61	129,34	106,91	125,25	226,47
Kab.Pontianak	68,26	72,99	61,45	105,59	71,80	76,02
Kab.Sanggau	98,95	85,98	98,26	101,61	79,53	92,87
Kab.Ketapang	135,75	118,55	111,52	114,88	93,55	114,85
Kab.Sintang	117,73	100,97	122,53	122,65	112,65	115,31
Kab.Kapuas Hulu	143,75	340,86	133,11	22,04	158,94	159,74
Kab.Sekadau	56,80	131,03	78,30	62,79	51,26	76,04
Kab.Melawi	115,24	45,89	85,11	53,76	86,63	77,33
Kab.Kayong Utara	-	-	134,31	174,78	68,16	125,75
Kab.Kubu Raya	-	-	177,23	88,94	75,36	113,84

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kota Pontianak	82,47	86,45	84,87	90,20	90,45	86,89
Kota Singkawang	112,33	94,23	82,91	89,69	84,15	92,66

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Adanya kecenderungan efektivitas PAD yang menurun dan fluktuatif dari data rata-rata menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pusat yang terlihat jelas dari rendahnya peran atau kontribusi PAD terhadap total penerimaan jika dibandingkan dengan kontribusi Dana Perimbangan yang melebihi 50% terhadap total penerimaan, meskipun setiap tahunnya PAD selalu mengalami peningkatan diiringi meningkatnya Dana Perimbangan. Disinilah dituntut agar Pemerintah Daerah lebih bijak dalam menggunakan transfer dari Pusat untuk menggali potensi daerahnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menggunakan transfer akan dapat mendukung efektivitas PAD sebab keberhasilan program atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi daerahnya dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Oleh sebab itu efektivitas PAD yang cenderung menurun memungkinkan berada dalam kondisi program atau kegiatan yang ada tidak memenuhi harapan publik atau dalam kondisi untuk mendapatkan subsidi dana yang lebih besar dalam bentuk transfer sehingga dana yang ada tidak dikelola dengan baik karena Pemerintah Pusat akan selalu memberikan sokongan dana dalam jumlah besar.

## 2) *Rasio Derajat Desentralisasi*

Tabel 8. sebagian besar kab/kota di Propinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan keuangan daerah atau desentralisasi fiskal dengan kategori sangat kurang (nilainya kurang dari 10%. Tangkilisan, 2005: 83) artinya Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan desentralisasi sepenuhnya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 8. Derajat Desentralisasi Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	2,96	3,04	3,61	3,57	3,36	3,30
Kab.Bengkayang	0,69	2,63	3,18	2,79	4,53	2,76
Kab.Landak	3,39	3,07	1,57	2,41	2,43	2,58
Kab.Pontianak	3,51	2,76	2,60	5,50	3,02	3,48
Kab.Sanggau	3,06	2,89	3,67	3,77	2,95	3,27
Kab.Ketapang	2,60	2,41	2,38	3,32	3,46	2,83
Kab.Sintang	3,82	2,86	3,55	3,96	3,73	3,58
Kab.Kapuas Hulu	1,66	4,85	2,01	0,24	2,40	2,23
Kab.Sekadau	0,16	1,50	1,94	2,83	2,51	1,79
Kab.Melawi	1,79	1,66	3,12	2,26	3,28	2,42
Kab.Kayong Utara	-	-	0,77	1,59	1,54	1,30
Kab.Kubu Raya	-	-	1,06	2,15	2,12	1,77

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kota Pontianak	10,04	10,19	8,23	9,59	11,08	9,83
Kota Singkawang	5,45	5,08	4,93	4,94	5,07	5,10

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Rendahnya derajat desentralisasi Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 2006 – 2010 yang berada pada kisaran di bawah 10% yang dilihat dari rata-rata, menunjukkan kontribusi PAD terhadap TPD hanya 10% sedangkan sisanya berasal dari transfer dan penerimaan pembiayaan. Dana transfer berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan dana penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sudah selayaknya dana-dana yang ada digunakan dengan bijak untuk membiayai pembangunan daerahnya agar terhindar dari keterpurukan ekonomi.

### 3) *Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah*

Tabel 9. menunjukkan kab/kota di Propinsi Kalimantan Barat memiliki ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat atau dana transfer masuk kategori tinggi (75-100%) dan sedang (50-75%).

Tabel 9. Ketergantungan Keuangan Daerah Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	90,04	80,99	83,59	79,59	86,71	84,18
Kab.Bengkayang	84,08	69,50	63,27	66,86	66,86	70,11
Kab.Landak	92,20	82,73	87,95	93,46	84,27	88,12
Kab.Pontianak	90,60	85,21	80,99	65,57	91,12	82,70
Kab.Sanggau	89,94	85,75	83,19	82,76	80,15	84,36
Kab.Ketapang	96,08	82,28	75,13	79,61	82,74	83,17
Kab.Sintang	90,96	82,30	79,97	82,73	85,51	84,29
Kab.Kapuas Hulu	92,03	85,24	83,67	83,07	77,63	84,33
Kab.Sekadau	96,22	83,15	81,18	79,41	69,92	81,98
Kab.Melawi	96,43	93,59	85,98	88,10	86,60	90,14
Kab.Kayong Utara	-	-	91,47	81,48	71,82	81,59
Kab.Kubu Raya	-	-	0,00	88,16	85,31	57,83
Kota Pontianak	87,74	86,52	62,90	72,73	63,31	74,64
Kota Singkawang	93,96	83,37	80,95	73,97	66,49	79,75

Sumber: BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Pengaruh transfer terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat sangat tinggi, terlihat jelas dari hasil perhitungan pada Tabel 9. nilai tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan transfer digunakan sebagian besar untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan. Jika peningkatan pendapatan transfer dialokasikan untuk penggalan PAD dengan sikap yang tidak overaktif menitikberatkan

pada peningkatan pajak dan retribusi, tetapi lebih pada kualitas dan bukan kuantitas karena (Kuncoro, 2004: 59) transfer diharapkan menjadi pendorong agar Pemerintah Daerah secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan sesuai kewenangannya sebab penggalan PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah.

Tingginya tingkat ketergantungan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 – 2010 yang dilihat dari rata-rata, menunjukkan bahwa ketergantungan suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh PAD tetapi faktor lain yaitu penerimaan pembiayaan.

#### 4) *Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010*

Tabel 10. rasio kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat tahun 2006 – 2010 masuk kategori rendah sekali (0-25%) dan memiliki pola hubungan *instruktif* yaitu peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian Pemerintah Daerah dalam membiayai kebutuhan fiskal dan hal ini menunjukkan peranan transfer dalam APBD lebih besar (Nataluddin dalam Halim, 2004 : 189)

Tabel 10 Keuangan Daerah Kab/Kota Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	3,28	3,75	4,32	4,31	3,76	3,88
Kab.Bengkayang	0,82	3,78	5,02	4,17	6,78	4,11
Kab.Landak	3,68	3,71	1,79	2,48	2,60	2,85
Kab.Pontianak	3,83	3,23	3,20	8,06	3,32	4,33
Kab.Sanggau	3,40	3,37	4,41	4,56	3,68	3,88
Kab.Ketapang	2,70	2,92	3,17	4,17	4,18	3,43
Kab.Sintang	4,20	3,48	4,44	4,78	4,36	4,25
Kab.Kapuas Hulu	1,79	5,69	2,41	0,29	3,09	2,65
Kab.Sekadau	0,17	1,81	2,39	3,41	3,25	2,20
Kab.Melawi	1,85	1,78	3,63	2,56	3,79	2,72
Kab.Kayong Utara	-	-	0,83	1,95	2,15	1,64
Kab.Kubu Raya	-	-	0,00	2,44	2,48	1,64
Kota Pontianak	11,39	11,77	13,09	13,18	17,50	13,38
Kota Singkawang	5,81	6,10	6,09	6,52	7,62	6,43

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Tabel 11. menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat 2006-2010 masuk kategori rendah sekali (0-25%) dan memiliki pola hubungan *instruktif* yaitu kontribusi PAD dan bagi hasil (pajak dan bukan pajak) terhadap total penerimaan daerah belum memberikan sumbangsih yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika Pemerintah Daerah dapat mengelola potensi daerahnya dalam hal bagi hasil tentu akan memberikan kontribusi yang positif bagi sumber penerimaan daerah (Nataluddin dalam Halim, 2004 : 189).

Tabel 11. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	9,63	8,03	10,67	10,06	10,94	9,87
Kab.Bengkayang	3,61	7,73	9,68	9,62	11,36	8,40
Kab.Landak	11,56	11,09	9,21	12,52	4,02	9,68
Kab.Pontianak	8,60	10,21	8,76	14,53	10,29	10,48
Kab.Sanggau	9,58	12,99	11,70	12,67	12,19	11,83
Kab.Ketapang	10,92	13,85	11,72	14,28	16,91	13,54
Kab.Sintang	10,46	12,00	10,87	11,81	13,58	11,74
Kab.Kapuas Hulu	10,57	12,92	10,21	7,40	11,11	10,44
Kab.Sekadau	10,35	11,32	10,85	12,16	13,86	11,71
Kab.Melawi	11,85	10,81	11,67	11,19	14,26	11,96
Kab.Kayong Utara	-	-	17,39	9,88	9,28	12,18
Kab.Kubu Raya	-	-	25,18	9,69	9,27	14,71
Kota Pontianak	24,77	24,83	19,36	25,09	27,27	24,26
Kota Singkawang	12,42	13,04	10,69	11,87	15,18	12,64

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Tabel 12 dan 13 di bawah menunjukkan tingkat kemandirian kemampuan keuangan daerah masuk kategori rendah (25-50%) dengan pola hubungan *konsultatif* artinya campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, daerah sedikit mampu melaksanakan otonomi dan masuk kategori rendah sekali (0-25%) dengan pola hubungan *instruktif* yaitu peranan Pemerintah Pusat dominan.

Tabel 12 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	23,06	6,60	7,25	7,72	17,45	12,41
Kab.Bengkayang	2,73	6,45	6,65	10,81	17,56	8,84
Kab.Landak	12,59	7,78	2,59	7,36	8,69	7,80
Kab.Pontianak	23,88	6,55	55,48	14,36	14,51	22,96
Kab.Sanggau	11,69	5,23	8,21	9,82	7,45	8,48
Kab.Ketapang	6,28	4,77	5,10	9,37	13,45	7,79
Kab.Sintang	18,61	5,19	6,49	22,19	26,19	15,74
Kab.Kapuas Hulu	5,68	14,65	4,56	0,95	9,22	7,01

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sekadau	0,62	2,75	3,17	4,52	4,45	3,10
Kab.Melawi	4,68	3,50	4,93	5,46	11,66	6,05
Kab.Kayong Utara	-	-	2,90	2,45	2,32	2,56
Kab.Kubu Raya	-	-	1,69	9,03	7,90	6,21
Kota Pontianak	22,08	20,64	22,02	19,20	44,17	25,62
Kota Singkawang	13,62	17,47	9,48	13,58	10,70	12,97

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Tabel 13. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2010

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Kab.Sambas	10,89	9,20	10,97	10,65	11,31	10,60
Kab.Bengkayang	3,61	11,63	13,09	11,36	13,42	10,62
Kab.Landak	12,57	12,24	9,62	12,18	4,09	10,14
Kab.Pontianak	8,60	11,46	9,09	15,48	11,14	11,15
Kab.Sanggau	8,66	10,68	12,72	13,73	13,07	11,77
Kab.Ketapang	12,53	17,62	13,42	15,57	17,87	15,40
Kab.Sintang	12,41	13,79	12,12	13,39	15,62	13,47
Kab.Kapuas Hulu	10,57	15,27	11,36	8,28	12,23	11,54
Kab.Sekadau	12,12	13,48	11,85	12,45	15,09	13,00
Kab.Melawi	12,09	10,81	11,95	11,49	14,64	12,19
Kab.Kayong Utara	-	-	20,71	11,35	9,95	14,00
Kab.Kubu Raya	-	-	31,22	10,56	9,80	17,19
Kota Pontianak	47,37	26,07	33,47	26,13	28,53	32,32
Kota Singkawang	12,42	14,15	15,14	11,96	15,62	13,86

Sumber : BPKAD Propinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan empat persamaan menunjukkan kemampuan keuangan yang masih rendah dan rendah sekali meskipun PAD telah ditambahkan dengan bagi hasil tetap saja memiliki kemandirian yang rendah artinya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat dalam memenuhi kebutuhan untuk menjalankan fungsinya dalam membangun dan menggali potensi daerah masih rendah dan tergantung pada Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari tingkat ketergantungan yang lebih dari 50% (Lihat Tabel 9).

c. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat*

*1) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Propinsi Kalimantan Barat*

Kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 2006 – 2010 dapat diukur dengan menggunakan variabel Rasio Efektivitas PAD ( $REPAD_{it}$ ), Rasio Derajat Desentralisasi ( $RDD_{it}$ ), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ( $RKetKD_{it}$ ), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menggunakan persamaan ke tiga ( $RKemKD3_{it}$ ), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menggunakan persamaan ke empat ( $RKemKD4_{it}$ ). Kelima variabel tersebut digunakan untuk mengukur kinerja keuangan kemudian kinerja keuangan dan pengeluaran pemerintah daerah ( $PPD_{it}$ ) akan dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 14 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Prob.	Kesimpulan
REPAD?	0.002338	1.427725	0.1601	Tidak Signifikan
RDD?	-0.384441	-4.139242	0.0001	Signifikan
RKetKD?	0.004940	0.847595	0.4011	Tidak Signifikan
RKemKD3?	0.042916	2.120892	0.0394	Signifikan
RKemKD4?	0.021835	2.262747	0.0284	Signifikan
PPD?	0.356172	4.125937	0.0002	Signifikan

Sumber : data hasil olahan e-views 6

Keterangan :  $RKemKD3$  dan  $RKemKD4$  merupakan variabel kemandirian keuangan daerah yang dihitung dengan menggunakan formula yang berbeda.

Variabel Rasio Efektivitas PAD ( $REPAD$ ) tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi 0,002338. Efektivitas PAD yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi terutama PDRB Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat karena efektivitas PAD mengalami kecenderungan yang menurun di akhir tahun 2010 (Lihat Tabel 7). Artinya program atau kegiatan yang ada, tidak memenuhi harapan publik atau jauh dari harapan misalnya pelayanan yang kurang memuaskan, kebijakan yang tidak memicu partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan menurunkan pendapatan perkapita, ditambah lagi dana transfer dari pusat tidak dikelola dengan baik karena Pemerintah Pusat akan selalu memberikan sokongan dana dalam jumlah besar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Variabel Rasio Derajat Desentralisasi ( $RDD$ ) memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi -0,384441. Koefisien derajat desentralisasi yang negatif menggambarkan derajat desentralisasi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama periode 2006 – 2010 belum mampu memberikan implikasi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi sebab kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan masih tergantung pada Pemerintah Pusat yang tergambar dari derajat desentralisasi yang cenderung menurun dan rendah (Lihat kembali Tabel 8).

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Tim peneliti PKP2A III LAN (2008), bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berimplikasi pada peningkatan kemampuan

keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah tergantung proporsi PAD dalam APBD. Artinya derajat desentralisasi akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika PAD meningkat dan mampu menciptakan kestabilan perekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian Tim peneliti PKP2A III LAN dan hasil estimasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa variabel derajat desentralisasi yang negatif disebabkan oleh kontribusi PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang tidak stabil dengan kecenderungan yang menurun selama 2006 – 2010, artinya Kabupaten/Kota belum mampu menciptakan kestabilan perekonomian di daerahnya dengan berbagai program yang dilakukan Pemerintah Daerah karena peningkatan PAD yang tidak stabil meskipun dana perimbangan mengalami kecenderungan yang menurun diakhir tahun 2010.

Fenomena ini dapat terjadi jika berada pada kondisi efektivitas PAD tetap atau tidak stabil dan dana transfer dari Pusat mengalami penurunan menyebabkan daerah yang belum memiliki kemampuan membiayai sendiri pemerintahannya mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun. Jadi tidak menuntut kemungkinan derajat desentralisasi memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apalagi Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat memiliki derajat desentralisasi yang rendah (Lihat Tabel 8).

Variabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKetKD) tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi 0,004940. Artinya pendapatan transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat tidak digunakan untuk membiayai belanja pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menggali potensi riil daerah yang dapat memberikan implikasi pada peningkatan PAD dan pada akhirnya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD yang tidak signifikan dan Rasio Derajat Desentralisasi yang signifikan tetapi memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi mendukung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi karena ketergantungan tidak hanya dipengaruhi oleh PAD tetapi juga faktor lain yaitu penerimaan pembiayaan.

Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3 (RKemKD3) menggunakan persamaan yang dilihat dari perbandingan antara PAD dengan pengeluaran rutin. Hasil estimasi RKemKD3 diperoleh koefisien regresi 0,042916 menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa PAD cukup memberikan implikasi yang baik dalam membiayai pengeluaran rutin yang dilakukan Pemerintah Daerah karena hanya memberikan kontribusi 4% sedangkan sisanya berasal dari transfer dan penerimaan pembiayaan.

Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 4 (RKemKD4) menggunakan persamaan yang dilihat dari perbandingan PAD ditambah bagi hasil dengan total pengeluaran. Variabel RKemKD4 berpengaruh signifikan. Artinya setelah PAD ditambah bagi hasil yang dibandingkan dengan total pengeluaran daerah juga memberikan implikasi yang baik dalam membiayai pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil estimasi kedua variabel kemandirian keuangan daerah tersebut, keduanya menunjukkan pengaruh yang positif dan nyata terhadap pertumbuhan

ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 2006 – 2010. Hal ini berarti kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri dengan menggunakan PAD dan bagi hasil yang didapat untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang didukung oleh partisipasi publik melalui pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD. Jadi semakin baik partisipasi publik akan memberikan implementasi yang baik juga bagi peningkatan pendapatan perkapita yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah (PPD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat:*

Variabel PPD memiliki hasil estimasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0,356172. Hasil estimasi variabel pengeluaran pemerintah daerah lebih tinggi dari pada hasil estimasi kelima variabel yang lain. Artinya belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah memberikan implikasi yang lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 2006 – 2010 dibandingkan variabel bebas yang lain.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Indrawati (2007) yaitu pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sodik (2007) bahwa pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sementara Lin (1994) yang dikutip dari Sodik menemukan pengeluaran tidak produktif negatif dan tidak signifikan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara industri tetapi signifikan positif berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Hasil estimasi beberapa peneliti mengindikasikan bahwa belanja atau pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran atau belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah yang lebih pada belanja pembangunan seperti membangun infrastruktur atau sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mampu menarik investor untuk membuka lapangan usaha sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pembangunan. Tetapi jika memandang dari sudut lain, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat apabila belanja pemerintah yang dilakukan lebih mendorong publik atau masyarakat untuk menjadi konsumtif.

Variabel PPD memiliki hasil estimasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0,356172. Hasil estimasi variabel pengeluaran pemerintah daerah lebih tinggi dari pada hasil estimasi kelima variabel yang lain. Artinya belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah memberikan implikasi yang lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 2006 – 2010 dibandingkan variabel bebas yang lain.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Indrawati (2007) yaitu pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sodik (2007) bahwa pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sementara Lin (1994) yang dikutip dari Sodik menemukan pengeluaran tidak produktif negatif dan tidak signifikan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara industri tetapi signifikan positif berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Hasil estimasi beberapa peneliti mengindikasikan bahwa belanja atau pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran atau belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah yang lebih pada belanja pembangunan seperti membangun infrastruktur atau sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mampu menarik investor untuk membuka lapangan usaha sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan pembangunan. Tetapi jika memandang dari sudut lain, pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat apabila belanja pemerintah yang dilakukan lebih mendorong publik atau masyarakat untuk menjadi konsumtif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran hasil analisis efisiensi, efektivitas dan kemandirian fiskal serta pengaruh kinerja keuangan daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2006-2010, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan efisiensi dan efektivitas Kabupaten/ Kota di Propinsi Kalimantan Barat menunjukkan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang sebagian besar memiliki kecenderungan menurun dan saling berkaitan artinya tingkat ekonomis yang baik akan sejalan dengan tingkat efisiensi yang dilakukannya dan tingkat efektivitas dapat mempengaruhi tingkat efisiensi tetapi efisiensi belum tentu dapat mempengaruhi efektivitas dari kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
2. Kemampuan fiskal daerah yang dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan kinerja keuangan yang masih memiliki ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yaitu: PAD memiliki kecenderungan yang menurun, derajat desentralisasi yang masih rendah, ketergantungan keuangan daerah yang memiliki kecenderungan menurun tetapi masih di atas 50% dan tingkat kemandirian yang cukup rendah.
3. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada era Otonomi Daerah tahun 2006 – 2010 menghasilkan estimasi yang nyata atau signifikan yang memiliki pengaruh positif dan tingkat koefisien tertinggi artinya pengeluaran yang dilakukan pemerintah memberikan stimulus yang baik pada pertumbuhan ekonomi.  
Berdasarkan hasil estimasi regresi yang menggunakan metode GLS menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh nyata atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk variabel bebas RKemKD3 dan RKemKD4 sedangkan variabel REPAD dan RKetKD tidak signifikan, variabel RDD memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Muhammad. 2010. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Aceh”*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 9, No. 1, halaman 79-88.
- Alisman. 2014. *“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat”*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 1, No. 2, November 2014, ISSN. 2442-7411.
- Bati. 2009. *“Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara)*. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Devarajan, Shantayanan. Swaroop, Vinaya. Zou, Heng-fu. 1996. *“Journal of Monetary Economics : The Composition of Public Expenditure and Economic Growth”*, volume 37, page 313 – 344.

- Dwirandra, A.A.N.B. \_\_\_\_\_. “Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006”. Ejournal unud, halaman 1 – 21.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. Damayanti, Theresia, 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Hidayat, Paudi. Pratomo, A Wahyu. Harjito, Agus D, 2007. “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No. 3, Desember, Hal : 213-222.
- Indrawati, Budi. 2007. “Peranan Pengeluaran Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Era Orde Baru Dan Era Reformasi”. *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Volume 8, Nomor 1.
- Juanda, Bambang. 2009. *Ekonometrika : Pemodelan dan Pendugaan*. Bogor, Penerbit IPB PRESS.
- Kawung, George M.V. 2008. “Analisis Kemampuan Keuangan dan Tingkat Ketergantungan Daerah Propinsi Sulawesi Utara pada Era Desentralisasi Fiskal”. *Jurnal Formas*, volume 1, Nomor 4, Juni.
- Kuncoro, Haryo. 2004. “Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Konejra Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 9, No. 1, Juni 2004, Hal : 47 – 63.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 3. Yogyakarta, Penerbit Erlangga.
- Kurniawati, Tri dan Suhartono, 2010. “Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah : Kasus Kabupaten Banyumas Tahun 2003 – 2008”. Pusat Penelitian Keilmuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Terbuka.
- Ladjin, Nurjanna, 2008. “Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah”. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit BPF.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mulyana, Budi. Subkhan. Slamet, Kuwat, 2006. *Keuangan Daerah : Prespektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, Jakarta. Penerbit LPKPAP.
- Mustafa, Bob dan Halim, Abdul. 2009. “Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat”. *Jurnal Aplikasi Manajemen* Volume 7, Nomor 4, Nopember.
- Nachrowi, D Nachrowi. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika : Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Pulawan, I Made. 2008. “Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Bali”. Volume 15, Nomor 3, Oktober.
- Ronald, Andreans dan Sarmitatiningsih, Dwi. 2010. “Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume 1, Nomor 1, Halaman 31 – 42.

- Sularso, Havid dan Restianto E, Yanuar. 2011. “*Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*”. Media Riset Akuntansi, Volume 1, Nomor 2, Halaman 109 – 124.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M, 2002. *Ekonomi Publik : Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Swaramarinda, Darma R.,Indriani, Susi. 2011. “*Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*”. Econosains, Volume 9, Nomor 2, Agustus.
- Syaukani, H. R, Gaffar, Afan, & Rasyid, M. Ryaas, 2007. *Otonomi Daerah : Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan ke VII, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- The World Bank. 2008. “*Making Decentralization Work for Development : Methodology of the Local Government Performance Measurement (LGPM) Frame Work*”. Decentralization Support Facility.
- TIM Peneliti PKP2A III LAN. 2008. “*Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kapasitas Kinerja Otonomi Daerah di Wilayah Kalimantan*”. Jurnal Borneo Administrator Volume 4, Nomor 2.
- Undang-Undang No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/138.pdf>. Akses tanggal 25 Desember 2011.
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. <http://www.bappenas.go.id/node/123/4/uu-no25-tahun-1999-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah/>. Akses tanggal 25 Desember 2011.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. [http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU\\_32\\_2004\\_Pemerintahan%20Daerah.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf). Akses tanggal 25 Desember 2011.
- Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. <http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-22-1999.pdf>. Akses tanggal 25 Desember 2011.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*, Dilengkapi Aplikasi Eviews, Edisi ketiga. Yogyakarta, Penerbit Ekonesia Fakultas Ekonomi UII.